



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

**INFORMASI
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023**

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Setiabudi No. 34.A Pati Kode Pos 59115

Telepon : (0295) 381842

Website : //inspektorat.patikab.go.id

Faksimile : (0295) 381025

E-mail : inspektorat@patikab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Reviu menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 ini.

Pati, 6 Maret 2024
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI

AGUS EKO WIBOWO, S.Farm., Apt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 19820828 200604 1 009

INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa informasi akuntabilitas yang disusun secara periodik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana anggaran dibelanjakan, akan tetapi menunjukkan apakah anggaran telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di pemerintah daerah dilakukan guna peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBD yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), Pemerintah Kabupaten Pati melaksanakan penyajian Informasi Akuntabilitas Kinerja yang disusun berdasar Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah pada poin 1 huruf f, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. METODE PENGUKURAN

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RPD. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan melakukan pengukuran capaian target kinerja yang

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pati dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 pada Lembar Kriteria Evaluasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja atau juga disebut *performance* dapat didefinisikan sebagai capaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan *input* bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi/instansi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu:

- Spesifik;
- Dapat dicapai;
- Relevan;
- Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- Dapat dihitung dan diukur.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2023. Adapun hasil pengukuran target dengan realisasi untuk masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Pati
Tahun 2023

NO	URAIAN IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,25	5,65*	132,94
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,84	4,29	88,28
3	Angka Kemiskinan	%	9,82	9,31	105,19
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,49	73,59	100,70
5	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,26	92,42*	100,17
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	62,10	68,54	110,37
<i>Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama</i>					

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan BPS Kabupaten Pati tahun 2023 *Data N-1

Berdasarkan tabel 2 dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pati terdapat 5 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 132,94%, (2) Angka Kemiskinan sebesar 105,19, (3) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,70%, (4) Indeks Pembangunan Gender sebesar 100,17%, (5) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 110,37%. Sementara ada 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang ditargetkan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian sebesar 88,28%.

3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2023, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Analisis terhadap 16 (enam belas) sasaran strategis dengan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RPD 2023-2026.

3.1 Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Berdasarkan strukturnya, perekonomian Kabupaten Pati, ditopang oleh beberapa lapangan usaha, seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Sektor

pertanian (secara luas) merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua dengan daya serap tenaga kerja tertinggi. Untuk meningkatkan investasi di suatu wilayah diperlukan upaya untuk mendorong daya saing, diantaranya adalah dengan meningkatkan kinerja faktor pendukung daya saing dan kondusifitas wilayah. Pengelolaan sumber daya air yang belum optimal berdampak terhadap aktivitas produksi masyarakat terutama untuk pertanian dan industri. Selain itu, sebagian jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak yang berpotensi menghambat aktivitas distribusi barang dan masyarakat. Selain itu, sektor perhubungan juga masih menyisakan masalah tingginya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan yang menunjukkan peningkatan intensitas setiap tahunnya. Lebih lanjut terwujudnya wilayah yang kondusif dan aman bagi masyarakat juga masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing daerah. Kriminalitas di Kabupaten Pati masih menunjukkan angka yang tinggi, walaupun hanya didominasi oleh kriminalitas ringan. Namun demikian, kondisi tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak aman di kalangan masyarakat. Peningkatan kriminalitas diantaranya bersumber dari maraknya pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

Pemenuhan ketersediaan beberapa jenis komoditas kebutuhan pokok menjadi tantangan yang perlu diselesaikan supaya tidak menyebabkan ketidakstabilan harga di masyarakat. Selain itu, persebaran sarana perdagangan, terutama yang dikelola pemerintah perlu dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di beberapa wilayah.

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan investasi. Beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pati mampu menarik investor untuk membangun industri, namun industri tersebut masih didominasi oleh investasi dari luar negeri, sementara investasi dalam negeri justru mengalami penurunan. Pertumbuhan industri nantinya akan berakibat pada pembukaan lapangan kerja sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran. Beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan jumlah pengangguran. Padahal, Kabupaten Pati sedang memasuki periode bonus demografi yang sepertinya belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebagian besar penduduk angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah, menjadi penyebab rendahnya kapasitas dan kualitas tenaga kerja. Sementara itu, ketersediaan lowongan pekerjaan yang sesuai mengalami penurunan dan upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja belum optimal dilaksanakan. Pada dasarnya, upaya untuk mengurangi pengangguran dan memanfaatkan bonus demografi dapat dilakukan dengan peningkatan kewirausahaan bagi penduduk usia muda. Namun demikian, upaya tersebut nampaknya terkendala oleh rendahnya minat pemuda untuk berwirausaha.

Grafik 1
Tren Capaian Tujuan Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

NO	URAIAN IKU	SATUAN	BASELINE 2022	REALISASI 2023	TREN
1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lap. Usaha Pertanian	%	4,23	4,23	
2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lap. Usaha Industri Pengolahan	%	4,73	4,73	
3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lap. Usaha Perdagangan	%	4,46	4,46	
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rupiah (000)	37.101	37.101	
5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Rupiah (000)	24.664	24.664	
6	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	%	87,33	76,52	
7	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Versi World Bank)	Angka	18,61	18,61	
8	Angka Kriminalitas	Angka	1,47	1,47	
9	Persentase Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Terhadap PDRB	%	1,078	1,078	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	53,82	53,82	

Tujuan 1, Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dicapai melalui 6 (enam) sasaran (1) Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama; (2) Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Masyarakat; (3) Menguatnya Infrastruktur Wilayah; (4) Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat; (5) Meningkatnya Kondusifitas Wilayah; dan (6) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta diukur dengan empat indikator dengan hasil pengukuran sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Pengukuran Kinerja Tujuan 1
Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				Target Akhir RPD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD
			Capaian 2022	2023				
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian	%	4,23	3,26	4,23*	131,37*	3,80	111,32
2	Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan	%	4,73	5,07	4,73*	97,53*	5,80	81,55
3	Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Perdagangan	%	4,46	2,15	4,46*	278,75*	5,79	77,03
4	PDRB Perkapita ADHB	Rupiah (000)	37.101	41.761,15	37.101*	101,98*	52.328,31	70,90
5	PDRB Perkapita ADHK	Rupiah (000)	24.664	24.648,32	24.664*	103,70*	28.209,66	87,43
6	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	%	87,33	76,00	76,52	100,68	79,00	96,86
7	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Versi World Bank)	Angka	18,61	19,03	18,61	98,47	21,48	86,64
8	Angka Kriminalitas	Angka	1,47	1,42	1,47	97,20	1,39	94,25
9	Persentase Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Terhadap PDRB	%	1,078	0,063	0,063	100%	0,048	131,25
10	IKLH	Angka	53,82	52,61	53,82	102,57	53,39	100,81
Rata-rata capaian Tujuan 1						111,325		94,95

Sumber : BPS, Tahun 2023 *Angka N-1

Dari Tabel 3. dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja untuk 10 indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 111,325% atau dengan kategori **“sangat tinggi”** dan bila dibandingkan dengan capaian akhir perencanaan jangka menengah yang akan selesai pada tahun 2026 sudah tercapai sebesar 99,29%. Untuk Capaian terendah ada pada indikator Angka Kriminalitas namun tetap dalam kategori baik dari target yang ditetapkan sebesar 1,42 terealisasi 1,47 dengan tingkat capaian sebesar 97,20% sedangkan untuk capaian tertinggi ada pada indikator Indeks Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan dari target yang ditetapkan sebesar 2,15 terealisasi 4,46 dengan tingkat capaian sebesar 278,75%. Capaian indikator yang sudah melampaui target pada akhir rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah indikator Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian yang tercapai 111,32 % dari target yang ditetapkan sebesar 3,26 pada akhir periode sudah tercapai 4,23 pada tahun pertama perencanaan. Untuk indikator lain jika dibandingkan dengan target pada akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah termasuk kategori **“sangat tinggi”** dengan rata – rata persentase capaian sebesar 94,95%.

Capaian Sasaran-sasaran Strategis diatas dilaksanakan melalui program :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
7. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
8. Program Pelayanan Penanaman Modal
9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
10. Program Penyelenggaraan Jalan
11. Program Penyelenggaraan JalanProgram Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
12. Pengembangan Ekspor
13. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
14. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif
15. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
16. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
17. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
18. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
19. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

20. Program Administrasi Pemerintahan Desa
21. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
22. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
23. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
24. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
25. Program Penanggulangan Bencana
26. Program Penanganan Bencana
27. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
28. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
29. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
30. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
31. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
32. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
33. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
34. Program Pengelolaan Persampahan
35. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3.2 Menurunnya Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan. Salah satu komponen terpenting untuk mengukur TPT adalah jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah akan meningkatkan kapasitas daerah dalam memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya, peningkatan barang dan jasa berpotensi menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dapat dianalisis melalui elastisitas penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah Kabupaten melakukan upaya-upaya konkrit dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ;

1. Melakukan Pelatihan Kerja untuk Pencari Kerja
Balai Latihan Kerja Kabupaten Pati melakukan pelatihan bagi pencari kerja baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Selama tahun 2023 sampai bulan Oktober BLK Pati telah melakukan pelatihan sebanyak 39

paket dengan jumlah peserta sebanyak 624 orang dan penempatan alumni pelatihan sebanyak 233 orang.

2. Mengadakan *Job Fair*

Job Fair diadakan untuk memfasilitasi pencari kerja menemukan pekerjaan sesuai kualifikasi. Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan beberapa SMK di Pati melaksanakan *Job Fair*. Diadakan *job fair* sebanyak 4 event yaitu di SMK Negeri 2 Pati, SMK Bani Muslim, SMK Salafiyah, dan SMKN 1 Cluwak.

3. Melakukan Kerjasama dengan Perusahaan untuk Penempatan Tenaga Kerja Pada 11 Januari 2024 bertempat di Aula disnaker telah dilaksanakan Rakor BKK (Bursa Kerja Khusus) yang dihadiri oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jateng, Kepala SMK/SMA sederajat dan Pengelola BKK Se Kab Pati.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan ketersediaan pasokan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa di suatu wilayah. TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Hal tersebut merupakan akibat dari bonus demografi yang sekarang sedang dinikmati oleh Kabupaten Pati. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja selanjutnya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja. Gambaran jumlah penduduk usia kerja, penduduk bekerja, dan rasio penduduk bekerja di Kabupaten Pati tahun 2018 hingga 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pati Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Usia Kerja	978.797	987.145	999.911	1.006.496	1.013.332
Jumlah Penduduk Bekerja	627.565	626.261	607.706	662.492	692.477
Rasio Penduduk Bekerja	0,64	0,63	0,61	0,66	0,68

Sumber: BPS Kab. Pati, 2023

Tahun 2020, Jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Pati sempat mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kondisi tersebut yang juga menyebabkan rasio penduduk bekerja mengalami penurunan dan mencapai titik terendah selama empat tahun terakhir, sebesar 0,61. Mulai tahun 2021, jumlah penduduk bekerja mulai mengalami peningkatan hingga di tahun 2022, jumlah penduduk bekerja mencapai angka lebih dari 692 ribu jiwa. Kondisi tersebut menyebabkan rasio penduduk bekerja mengalami peningkatan menjadi 0,68 dan merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Sebagai perbandingan untuk realisasi capaian kinerja tujuan 2 dengan *baseline* capaian pada indikator yang sama di tahun perencanaan yang lalu sebagaimana Grafik 2 berikut ini :

Grafik 2
Tren Capaian Tujuan Menurunnya Pengangguran

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2022	REALISASI 2023	TREN
1	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	Angka	0,81	0,77	
2	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	%	71,52	73,1	

Tujuan 2, Menurunnya Pengangguran, dicapai melalui 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya Kesempatan dan Peluang Kerja dan diukur dengan 2 (dua) indikator dengan hasil pengukuran sebagaimana pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 4
Pengukuran Kinerja Tujuan 2
Menurunnya Pengangguran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Target Akhir RPD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD	
			Capaian 2022	2023				
			Target	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	Angka	0,81	1,70	0,77	154,71	0,90	85,56
2	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	%	71,52	69,15	73,10	105,71	69,60	105,03
<i>Rata-rata capaian Tujuan 2</i>						130,21		95,29

Sumber : BPS Kabupaten Pati Tahun 2023

Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa untuk tujuan Menurunnya Pengangguran diukur dengan 2 indikator sasaran rata-rata tercapai sebesar 130,21% atau kategori “**Sangat Tinggi**”, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun baseline 2022 terdapat penurunan sebesar 0,40%, pada indikator Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja, namun demikian secara capaian kinerja tetap pada kriteria “sangat tinggi” karena realisasi melampaui target sebesar 0,7%. Sementara untuk indikator TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) mencapai angka 73,10% atau meningkat sebesar 1,58% jika dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 71,52%. Untuk capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja jika dibandingkan dengan target tahun akhir perencanaan

yang sebesar 69,60 maka realisasi indikator sudah melampaui sebesar 3,5 % atau tercapai sebesar 105,03%. Capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh program penempatan tenaga kerja.

3.3 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati pada Maret 2023 berjumlah 118,18 ribu jiwa, sedikit mengalami kenaikan sekitar 0,14 ribu jiwa bila dibandingkan kondisi Maret 2022 (118,04 ribu jiwa). Sementara itu, persentase penduduk miskin (tingkat kemiskinan) pada Maret 2023 sebesar 9,31 persen dari total penduduk, turun 0,02 persen poin terhadap Maret 2022 (9,33 persen).

Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan turunnya tingkat kemiskinan pada periode Maret 2021-Maret 2023 di seluruh wilayah Indonesia disebabkan dengan mulai meredanya pandemi Covid-19 di Indonesia dan Pemerintah RI mulai melonggarkan pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setelah pertengahan tahun 2021.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Selama periode Maret 2019-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pati mengalami perkembangan yang fluktuatif. Setelah turun naik pada periode Maret 2019- Maret 2021 hingga mencapai 1,69, tertinggi selama 5 tahun terakhir, P1 pada Maret 2022 turun menjadi 1,20. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pati pada Maret 2022 cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dibandingkan Maret 2021. Namun, P1 pada Maret 2023 kembali naik menjadi 1,64 yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada Maret 2023 kembali menjauhi garis kemiskinan.

Kabupaten Pati menunjukkan kinerja pengurangan kemiskinan yang cukup baik dengan menurunnya jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan, maupun kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun demikian, terdapat indikasi penduduk miskin tersebar tidak merata, dimana terdapat kecamatan dengan persentase penduduk miskin

yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Persebaran ketersediaan dan kualitas layanan dasar yang tidak merata diduga menjadi penyebab kesenjangan kemiskinan antarwilayah. Upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Pati akan difokuskan pada penyediaan dan pemerataan layanan dasar bagi masyarakat miskin, meliputi air minum, sanitasi, pemukiman, jaminan kesehatan, dan kepemilikan dokumen kependudukan. Namun demikian, ketersediaan data yang akurat dan terbaru menjadi kendala yang berpotensi menyebabkan pemenuhan layanan dasar bagi penduduk miskin tidak tepat sasaran. Selain penyediaan layanan dasar, prioritas penurunan kemiskinan juga akan diprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat miskin.

Upaya pengentasan kemiskinan juga diarahkan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar di seluruh wilayah, melalui penanganan rawan pangan, penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan air minum, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Desa juga memegang peranan penting dalam penurunan kemiskinan, melalui peningkatan swadaya masyarakat dan peran lembaga kemasyarakatan desa. Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan melalui penyediaan perencanaan tenaga kerja daerah, pelatihan dan uji kompetensi, serta penempatan tenaga kerja, dan pelatihan bagi usaha mikro dan wirausaha muda

Pemerintah Kabupaten Pati berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan prioritas perencanaan:

1. Peningkatan akses layanan dasar bagi penduduk miskin, difokuskan pada:
 - Penguatan koordinasi antar perangkat daerah yang menyediakan akses pelayanan dasar dalam upaya penanganan kemiskinan daerah;
 - Peningkatan akses layanan dasar (air minum, sanitasi, hunian layak, kesehatan, pendidikan);
 - Peningkatan upaya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
2. Penguatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menurunkannya kesenjangan antar penduduk miskin, difokuskan pada:
 - Penguatan koordinasi antar perangkat daerah yang berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin daerah;
 - Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Grafik 3
Tren Capaian Tujuan Menurunnya Tingkat Kemiskinan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE	REALISASI	TREN
			2022	2023	
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Angka	1,2	1,64	
2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Angka	0,25	0,42	
3	Persentase Penduduk Dengan Akses pada Layanan Air Minum	%	81,99	82,7	
4	Persentase Penduduk Dengan Akses pada Layanan Sanitasi	%	100	100	
5	Persentase Penduduk Dengan Akses pada Layanan Fasilitas Penyehatan Dasar	%	100	100	
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	%	95,24	95,69	

Tujuan 3, Menurunnya Tingkat Kemiskinan, dicapai melalui 2 (dua) sasaran yaitu (1) Menurunnya Kesenjangan antar Penduduk Miskin; (2) Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar dan diukur dengan 6 (enam) indikator dengan hasil pengukuran sebagaimana pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Pengukuran Kinerja Tujuan 3
Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				Target Akhir RPD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD
			Capaian 2022	2023				
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Angka	1,2	1,56	1,64	94,87	1,37	80,30
2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,25	0,36	0,42	83,33	0,26	38,50
3	Persentase Penduduk Dengan Akses pada Layanan Air Minum	%	81,99	82,29	82,70	100,50	83,79	98,70
4	Persentase Penduduk Dengan Akses pada Layanan Sanitasi	%	100	100,00	100,00	100,00	100	100,00
5	Persentase Penduduk Dengan Akses pada Layanan Fasilitas	%	100	86,15	100,00	116,08	89,15	112,17

	Penyehatan Dasar							
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	%	95,24	94,87	95,69	100,86	96,70	98,96
Rata-rata Capaian Tujuan 3						99,27		88,10

Sumber : BPS Kabupaten Pati Tahun 2023.

Dari Tabel 5 dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan Menurunnya Tingkat Kemiskinan untuk 6 indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 99,27% atau dengan kategori “**Sangat Tinggi**” dan bila dibandingkan dengan capaian akhir perencanaan jangka menengah yang akan selesai pada tahun 2026 sudah tercapai dengan rata-rata sebesar 88,10% artinya untuk mencapai target di akhir periode perencanaan akan lebih mudah. Untuk Capaian terendah ada pada indikator Indeks Keparahan Kemiskinan namun tetap dalam kategori baik dari target yang ditetapkan sebesar 0,36 terealisasi 0,42 dengan tingkat capaian sebesar 83,33% sedangkan untuk capaian tertinggi ada pada indikator Persentase Penduduk Dengan Akses pada Layanan Fasilitas Penyehatan Dasar dari target yang ditetapkan sebesar 86,15 terealisasi 100 dengan tingkat capaian sebesar 116,08%. Capaian indikator yang sudah melampaui target pada akhir rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah indikator Persentase Penduduk Dengan Akses pada Layanan Sanitasi yang tercapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 pada akhir periode sudah tercapai 100 pada tahun pertama perencanaan, kemudian indikator lainnya yang sudah mencapai target akhir perencanaan adalah Persentase Penduduk Dengan Akses pada Layanan Fasilitas Penyehatan Dasar yang tercapai 112,17 % dari target yang ditetapkan sebesar 89,15 pada akhir periode sudah tercapai 100 pada tahun pertama perencanaan. Untuk indikator lain jika dibandingkan dengan target pada akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah termasuk kategori “**Tinggi**” dengan rata – rata persentase capaian sebesar 88,10%.

Capaian kinerja sasaran strategis diatas di dukung oleh:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Rehabilitasi Sosial

3.4 Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk

Kualitas hidup penduduk adalah konsep yang mencakup semua aspek kehidupan yang mempengaruhi kesejahteraan dan kepuasan individu dalam suatu wilayah. Hal ini mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis, serta lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aspek Kesehatan terwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Aspek Pendidikan direpresentasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara aspek Ekonomi terwakili oleh Pengeluaran Perkapita. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pati terus mengalami perbaikan selama periode 2018-2023, bahkan di tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Pati telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator kualitas SDM pada aspek kesehatan. UHH dapat didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Peningkatan UHH menjadi tantangan bagi pembangunan manusia, karena semakin tinggi UHH dapat berpengaruh terhadap peningkatan angka ketergantungan serta potensi peningkatan pembiayaan di bidang kesehatan terkait kerentanan kelompok usia terhadap beberapa masalah kesehatan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator kualitas SDM pada aspek pendidikan. HLS dapat diartikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan dari tahun baseline 2022 hingga tahun awal periode 2023-2026.

Indikator kualitas SDM aspek pendidikan lainnya adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Masih rendahnya RLS Kabupaten Pati utamanya didominasi oleh penduduk usia tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah bahkan tidak bersekolah. Hal inilah yang menjadikan upaya peningkatan kepesertaan kesetaraan pendidikan menjadi tidak optimal dan menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan RLS.

Pengukuran kualitas SDM pada aspek ekonomi dilakukan melalui pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita dapat didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota keluarga selama sebulan dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga

dibedakan menjadi pengeluaran makanan dan non makan. Pola pengeluaran merupakan salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan penduduk dimana semakin rendah proporsi untuk pengeluaran makanan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Grafik 4
Tren Capaian Tujuan Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2022	REALISASI 2023	TREN
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	76,32	76,39	
2	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56,83	63,07	
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,79	7,80	
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95	12,96	
5	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah (000)	10.948,00	11.385,00	

Tujuan 4, Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk, dicapai melalui 3 (tiga) sasaran yaitu (1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; (2) Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan dan; (3) Meningkatnya Standar Hidup Masyarakat serta diukur dengan 5 (lima) indikator dengan hasil pengukuran sebagaimana pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 6
Pengukuran Kinerja Tujuan 4
Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Target Akhir RPD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD	
			% Capaian 2022	2023				
(1)	(2)	(3)	(4)	Target	Realisasi	(7)	(8)	(9)
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	76,32	76,31	76,39	100,10	76,37	100,03
2	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56,83	56,29	63,07	112,04	60,02	105,08
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,79	7,55	7,80	103,31	7,75	100,65
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95	13,08	12,96	99,08	13,23	97,96
5	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah (000)	10.948,00	10.946,20	11.385,00	104,01	11.422,00	99,68
<i>Rata-rata Capaian Tujuan 4</i>						103,71		100,68

Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2024.

Dari Tabel 6 dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk untuk 5 indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 103,71% atau dengan kategori **“Sangat Tinggi”** dan bila dibandingkan dengan capaian akhir perencanaan jangka menengah yang akan selesai pada tahun 2026 sudah tercapai dengan rata-rata sebesar 100,68% artinya untuk mencapai target di akhir periode perencanaan akan lebih mudah. Untuk Capaian terendah ada pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah namun tetap dalam kategori **“sangat tinggi”** dari target yang ditetapkan sebesar 13,08 terealisasi 12,96 dengan tingkat persentase capaian sebesar 99,08% sedangkan untuk capaian tertinggi ada pada indikator Indeks Pembangunan Keluarga dari target yang ditetapkan sebesar 56,29 terealisasi 63,07 dengan tingkat capaian sebesar 112,04%. Capaian indikator yang sudah melampaui target pada akhir rencana Pembangunan Jangka Menengah Umur Harapan Hidup yang tercapai 100,03 % dari target yang ditetapkan sebesar 76,37 pada akhir periode sudah tercapai 76,39 pada tahun pertama perencanaan, kemudian indikator lainnya yang sudah mencapai target akhir perencanaan adalah Indeks Pembangunan Keluarga yang tercapai 105,08 % dari target yang ditetapkan sebesar 60,02 pada akhir periode sudah tercapai 63,07 pada tahun pertama perencanaan, serta indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang tercapai 100,65 % dari target yang ditetapkan sebesar 7,75 pada akhir periode sudah tercapai 7,80 pada tahun pertama perencanaan. Untuk indikator lain jika dibandingkan dengan target pada akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah termasuk kategori **“sangat tinggi”** dengan rata – rata persentase capaian sebesar 100,68%.

Capaian kinerja sasaran strategis diatas di dukung oleh:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Pengembangan Kurikulum
6. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
8. Program Pembinaan Perpustakaan
9. Program Pengembangan Kebudayaan
10. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

3.5 Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki 1 (satu) indikator yaitu Indeks pembangunan gender (IPG), IPG mencerminkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, komponen IPG sama dengan komponen IPM namun dipilah antara laki-laki dan perempuan. Capaian IPG Kabupaten Pati sempat mengalami penurunan di tahun 2020, namun kembali menunjukkan peningkatan lumayan drastis di tahun 2021 menjadi 92,21. Selanjutnya, di tahun 2022, IPG Kabupaten Pati kembali menunjukkan peningkatan menjadi 92,42 dan merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Meningkatnya IPG menjadi indikasi semakin rendahnya kesenjangan kualitas penduduk perempuan dan penduduk laki-laki.

Rasio UHH Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir selalu berada pada nilai lebih dari satu yang menunjukkan derajat kesehatan penduduk perempuan lebih baik dibandingkan derajat kesehatan penduduk laki-laki. Peningkatan rasio UHH yang menjadi indikasi semakin lebarnya kesenjangan derajat kesehatan penduduk berdasarkan gender. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas kesehatan bagi penduduk laki-laki perlu lebih ditingkatkan sehingga kesenjangan gender tidak menjadi semakin besar.

Selama periode lima tahun terakhir, Harapan lama sekolah penduduk perempuan di Kabupaten Pati cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk laki, penurunan kesenjangan gender pada aspek pendidikan perlu mendapatkan perhatian karena dapat memengaruhi kesenjangan pada aspek lainnya, terutama ekonomi, dimana aspek ekonomi memiliki tingkat kesenjangan yang paling tinggi dibandingkan aspek kesehatan dan pendidikan. Kesenjangan gender aspek ekonomi dilihat dari rasio pengeluaran perkapita penduduk perempuan dibagi dengan pengeluaran perkapita penduduk laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan gender, yang secara spesifik menitikberatkan kepada peran serta perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Komponen IDG terdiri dari Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen, Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan. Berikut grafik tren capaian indikator kinerja tujuan Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia:

Grafik 5
Tren Capaian Tujuan Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE	REALISASI	GRAFIK
			2022	2023	
1	Rasio Angka Harapan Hidup antara Perempuan Dan Laki-Laki	Angka	1,05	1,05	
2	Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Antara Perempuan dan Laki-Laki	Angka	0,9	0,9	
3	Rasio Harapan Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-Laki	Angka	0,99	0,99	
4	Rasio Pengeluaran Per Kapita antara Perempuan dan Laki-Laki	Angka	0,66	0,66	
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	68,65	68,65	

Tujuan 5, Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia, dicapai melalui 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya Kesetaraan Kualitas Hidup Penduduk Laki-Laki dan Perempuan dan diukur dengan 5 (lima) indikator dengan hasil pengukuran sebagaimana pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 7
Pengukuran Kinerja Tujuan 5
Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				Target Akhir RPD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD
			% Capaian 2022	2023				
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio Angka Harapan Hidup antara Perempuan Dan Laki-Laki	Angka	1,05	1,05	1,05*	100,00*	1,05	100,00
2	Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Antara Perempuan dan Laki-Laki	Angka	0,90	0,86	0,90*	104,65*	0,86	104,65
3	Rasio Harapan Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-Laki	Angka	0,99	0,97	0,99*	102,06*	0,97	102,06
4	Rasio Pengeluaran Per Kapita antara Perempuan dan Laki-Laki	Angka	0,66	0,66	0,66*	100,00*	0,66	100,00
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	68,65	66,70	68,65*	103,23*	67,60	101,55
<i>Rata-rata Capaian Tujuan 5</i>						101,99		101,65

Sumber data : BPS Kabupaten Pati Tahun 2023 *Angka N-1

Dari Tabel 7 dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia dengan 5 indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 101,99% atau dengan kategori “**Sangat Tinggi**” dan bila dibandingkan dengan capaian akhir perencanaan jangka menengah yang akan selesai pada tahun 2026 sudah tercapai dengan rata-rata sebesar 101,65% artinya target di akhir periode perencanaan sudah tercapai. Untuk Capaian terendah ada pada indikator Rasio Angka Harapan Hidup antara Perempuan Dan Laki-Laki dan indikator Rasio Pengeluaran Per Kapita antara Perempuan dan Laki-Laki namun keduanya tetap dalam kategori “sangat tinggi” karena masing ada pada capain 100% dari target yang ditetapkan. sedangkan untuk capaian tertinggi ada pada indikator Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Antara Perempuan dan Laki-Laki dari target yang ditetapkan sebesar 0,86 terealisasi 0,90 dengan tingkat capaian sebesar 104,65%. Untuk indikator lain jika dibandingkan dengan target pada akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah termasuk kategori “**sangat tinggi**” dengan rata – rata persentase capaian sebesar 101,65%.

Capaian kinerja sasaran strategis diatas di dukung oleh:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Perlindungan Khusus Anak
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

3.6 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pencapaian target pembangunan daerah tidak akan terwujud tanpa dukungan tata kelola pemerintahan yang baik. Permasalahan utama dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Pati adalah fungsi birokrasi yang belum efisien dan efektif serta pelayanan publik yang belum merata dan berkualitas. Sinergi antara perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi belum terjalin secara optimal. Mewujudkan perencanaan berkualitas masih menjadi tantangan, utamanya terkait keselarasan dan sinkronisasi antar-dokumen perencanaan. Selain itu, pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah belum optimal dilakukan menjadikan upaya pencapaian pencapaian tujuan pembangunan daerah belum optimal. Permasalahan dalam urusan pengawasan adalah belum seluruh perangkat daerah melaksanakan pengendalian internal.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik yang berkualitas dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas, dimana hal tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Tantangan utama dalam mewujudkan ASN yang profesional adalah masih adanya ketidaksesuaian jabatan dengan pendidikan serta masih ditemukannya pelanggaran disiplin oleh sebagian ASN. Selain itu, rekrutmen pegawai juga belum efektif dengan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Namun, belum tersedianya analisis kebutuhan diklat atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) membuat diklat yang diikuti oleh pegawai belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pengukuran kinerja telah menunjukkan kinerja yang cukup baik di tahun 2023. Namun demikian, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain masih terdapatnya beberapa program kegiatan yang tidak memiliki kontribusi yang signifikan bagi pencapaian kinerja pemerintah daerah. Selain itu, pengukuran kinerja individu masih didasarkan pada aktivitas rutin, bukan aktivitas yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Selain melalui evaluasi SAKIP, penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah juga diukur melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran kualitas pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perangkat daerah yang menyediakan pelayanan. Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik didasarkan pada sembilan unsur pelayanan. Dari sembilan unsur tersebut, lima unsur termasuk dalam kategori sangat baik, meliputi Persyaratan Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Kompetensi/Kemampuan Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan. Sementara itu, empat unsur lainnya mendapat kategori Baik, meliputi Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Produk Pelayanan, dan Sarana & Prasarana. Selanjutnya, keempat unsur ini lah yang membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Reformasi birokrasi juga mencakup kinerja pelaporan keuangan. Capaian kinerja pelaporan keuangan Kabupaten Pati selama periode 2018-2023 tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 8 Status Pelaporan Keuangan Kabupaten Pati
Periode 2018-2023**

Status Laporan Keuangan					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan apabila Kabupaten Pati mampu menunjukkan kinerja pelaporan keuangan yang cukup memuaskan selama enam tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, walaupun masih terdapat beberapa proses yang masih memiliki kelemahan dan memerlukan perbaikan.

Beberapa hal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Penguatan fungsi birokrasi dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dengan prioritas pada Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, serta mewujudkan kemandirian fiskal daerah, difokuskan kepada:

- Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
- Kemudahan akses mendapatkan layanan publik, serta perluasan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
- Perumusan kebijakan daerah yang memberikan prioritas kepada kemandirian fiskal daerah;
- Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Grafik 6
Tren Capaian Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2022	REALISASI 2023	TREN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,55	3,62	
2	Nilai SAKIP	Angka	65,04	65,47	
3	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	45,97	66,25	
4	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	3	
5	MRI (Indeks Manajemen Resiko)	Level	3	2	

6	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3	2	
7	Indeks SPBE	Angka	2,75	3,67	
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	73,55	73,55	
9	Rasio Ketergantungan Fiskal	Angka	86,52	86,52	
10	Rasio Kemandirian Fiskal	Angka	15,59	15,59	

Tujuan 6, Meningkatnya Kesetaraan Kualitas Hidup Penduduk Laki-Laki dan Perempuan, dicapai melalui 3 (tiga) sasaran yaitu (1) Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik; (2) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan SDM yang Kompeten dan; (3) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah serta diukur dengan 10 (sepuluh) indikator dengan hasil pengukuran sebagaimana pada Tabel berikut ini:

Tabel 9
Pengukuran Kinerja Tujuan 6
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				Target Akhir RPD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD
			% Capaian 2022	2023				
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,55	3,45	3,62	104,93	3,60	100,56
2	Nilai SAKIP	Angka	65,04	65,24	65,47	100,35	66,00	99,20
3	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	45,97	61,00	66,25	108,61	75,00	88,33
4	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	3,00	100,00	3,0	100,00
5	MRI (Indeks Manajemen Resiko)	Level	3	2,00	2,00	100,00	3,0	66,67
6	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3	2,00	2,00	100,00	3,0	66,67
7	Indeks SPBE	Angka	2,75	2,75	3,67	133,45	2,80	131,07
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	73,55	64,75	73,55*	113,60	71,65	102,65
9	Rasio Ketergantungan Fiskal	Angka	86,52	85,26	86,52*	101,50	84,54	102,34

10	Rasio Kemandirian Fiskal	Angka	15,59	17,59	15,59*	88,63	17,92	87,00
Rata-rata Capaian Tujuan 6						105,10		94,45

Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2023 *Capaian N-1

Dari Tabel 8 dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan 10 indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 105,10% atau dengan kategori **“Sangat Tinggi”** dan bila dibandingkan dengan capaian akhir perencanaan jangka menengah yang akan selesai pada tahun 2026 dengan rata-rata capaian sebesar 94,45% artinya target di akhir periode perencanaan jangka menengah diperkirakan akan terlampaui dari target yang ditentukan. Untuk Capaian terendah ada pada indikator Rasio Kemandirian Fiskal namun tetap dalam kategori **“tinggi”** karena masing-masing ada pada capaian 88,63% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk capaian tertinggi ada pada indikator Indeks SPBE dari target yang ditetapkan sebesar 2,75 terealisasi 3,67 dengan tingkat capaian sebesar 133,45%. Untuk indikator lain jika dibandingkan dengan target pada akhir Tahun Perencanaan Jangka Menengah termasuk kategori **“sangat tinggi”** dengan rata-rata persentase capaian sebesar 94,45%.

Capaian kinerja sasaran strategis diatas di dukung oleh:

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
5. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6. Program Penyelenggaraan Pengawasan
7. Program Kepegawaian Daerah
8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Program Pengelolaan Arsip
10. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
11. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran murni sebesar Rp2.700.639.169.000,00, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.790.051.006.591,00, belanja modal sebesar Rp213.390.251.409,00, belanja tidak terduga sebesar Rp17.513.112.000,00, dan belanja transfer sebesar Rp679.684.799.000,00 yang kemudian mengalami perubahan

dalam APBD Perubahan menjadi Rp2.831.274.761.000,00 dengan perincian belanja operasi sebesar Rp1.887.513.713.070,00, belanja modal sebesar Rp224.950.356.930,00, belanja tidak terduga sebesar Rp12.895.192.000,00, dan belanja transfer sebesar Rp705.915.499.000,00.

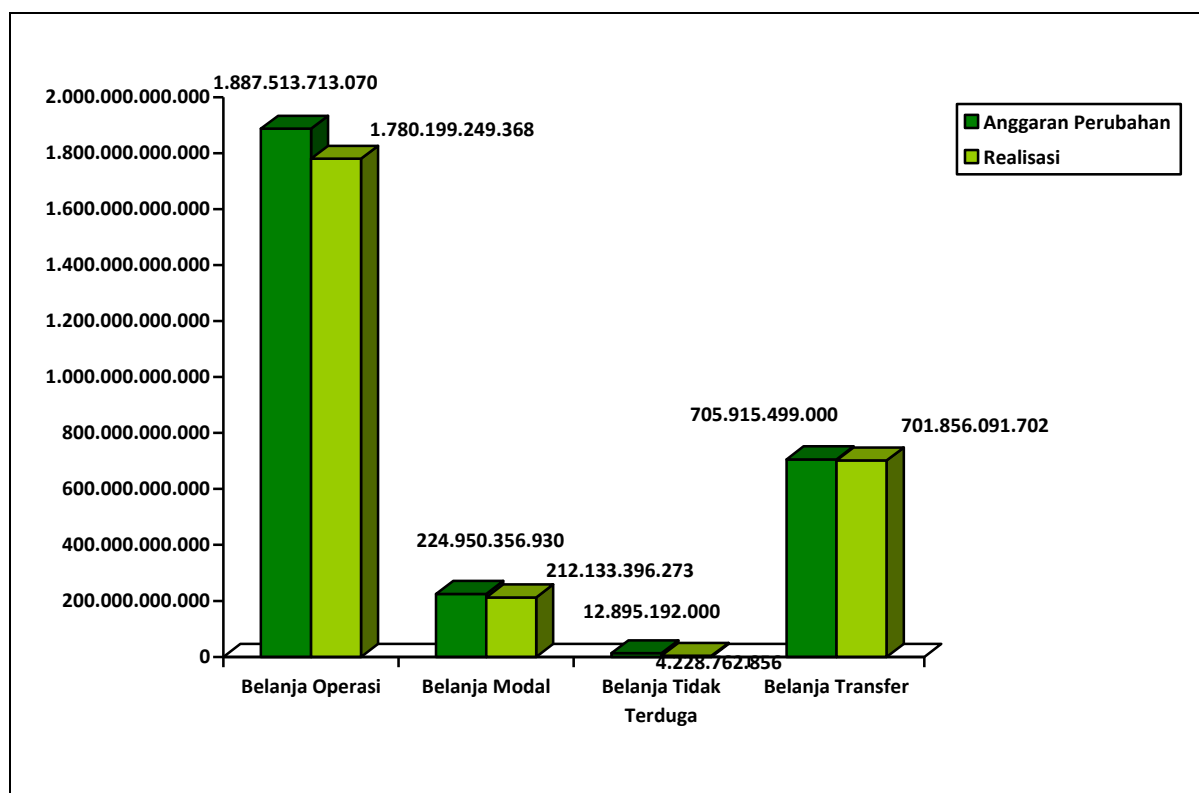
Tabel 10
Anggaran Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	%
Belanja Operasi	1.887.513.713.070,00	66,67
Belanja Modal	224.950.356.930,00	7,95
Belanja Tidak Terduga	12.895.192.000,00	0,46
Belanja Transfer	705.915.499.000,00	24,93
Total Belanja Daerah	2.831.274.761.000,00	100

Sumber : Diolah dari Data BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2023

Total realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp2.698.417.500.199,00 dengan perincian belanja operasi sebesar Rp1.780.199.249.368,00, belanja modal sebesar Rp212.133.396.273,00, belanja tidak terduga sebesar Rp4.228.762.856,00, dan belanja transfer sebesar Rp701.856.091.702,00.

Grafik 7
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023



Sumber : Diolah dari Data BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2023

Realisasi belanja untuk keseluruhan program sebesar Rp512.084.459.556,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terserap rata-rata 96,22% program/kegiatan di sasaran. Menurunnya pengangguran menyerap anggaran tertinggi dengan belanja total (98,01%). Sedangkan penyerapan terkecil pada di sasaran ketiga yaitu Menurunnya tingkat kemiskinan (93,48%).

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam capaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11
Realisasi Anggaran Belanja Program (dalam Rupiah) Tahun 2023

NO	TUJUAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	147.642.036.450	176.799.330.699	173.127.168.554	97,92	2,08
2	Menurunnya pengangguran	231.418.000	174.383.000	170.922.350	98,01	1,99
3	Menurunnya tingkat kemiskinan	238.981.761.300	291.111.812.900	272.143.108.543	93,48	6,52
4	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	21.984.931.050	19.402.783.950	18.784.307.254	96,81	3,19
5	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	701.932.381.100	5.026.362.100	4.844.232.442	96,38	3,64
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	42.313.472.000	45.422.747.500	43.014.720.413	94,70	5,30
	TOTAL	1.153.085.999.900	537.937.420.149	512.084.459.556		
			Rata-rata realisasi		96,22	
			Realisasi tertinggi		98,01	
			Realisasi terendah		93,48	

Sumber : Diolah dari Data BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2023

IV. PENUTUP

Penyusunan Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merujuk pada Rencana Strategis Kabupaten Pati 2023-2026 dalam mengelola kepercayaan masyarakat Kabupaten Pati. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Dibutuhkan sarana bagi pemangku kepentingan dalam mempertahankan kinerjanya, salah satunya dengan membangun sistem yang akuntabel dalam pelaksanaan pemerintahan. SAKIP merupakan sistem yang harus disempurnakan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SAKIP pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Pati Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator tujuan yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2023 ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh *Stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pati dalam upaya akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dapat memberikan dampak lebih luas pada kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Pati mendatang.

Maret 2024
P. Bupati Pati
HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT.

